

## **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Friyany Sumiaty Pandie\*, Jacob Abolladaka<sup>1</sup>, & Agustina Butar-Butar<sup>2</sup>  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana

\*e-mail: [friyany17@gmail.com](mailto:friyany17@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran berbasis kinerja berdampak pada kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 95 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 68 responden yang diambil sampelnya dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel diambil menurut kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup regresi linear sederhana, uji t dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 21. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,893 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,999773 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Kata Kunci:** *Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan*

**Abstract:** This study aims to determine how financial performance at the Industry and Trade Office of East Nusa Tenggara Province is influenced by performance-based budgeting. The research method used is quantitative with a causal associative approach. The population used in this study were all employees at the Industry and Trade Office of East Nusa Tenggara Province totaling 95 people and the sample used was 68 respondents who were sampled using purposive sampling techniques, where samples were taken according to certain criteria. Data analysis techniques used in this study include simple linear regression, t-test and determination coefficient test using SPSS 21. The results of the t-test showed a calculated t value of 9.893 greater than the t-table value of 1.999773 and a significance value of 0.000 smaller than the probability value of 0.05. The results of this study indicate that the performance-based budget variable has a positive and significant influence on financial performance at the Industry and Trade Office of East Nusa Tenggara Province.

**Keywords:** *Performance Based Budget, Financial Performance*

## PENDAHULUAN

Adanya sistem perencanaan yang menyeluruh yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat diperlukan karena perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai aparatur sipil Negara, pemerintah telah melakukan banyak hal penting untuk memperbaiki segala kekurangan, seperti mengatur anggaran dari pusat ke daerah. Anggaran merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan inisiatif pemerintah. Menurut Hafiz, (2021) anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan bisnis yang diwakili dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Dewi Kurniasari (dalam Dedeh Kurniasari, 2017) anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja yang berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasi. Pendekatan berbasis kinerja dalam penganggaran memberikan penekanan kuat pada gagasan pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja keluaran. Menurut Kuntadi Prita (dalam Yuniarti Ramayani, 2022) pendekatan anggaran

berbasis kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya mengubah dan menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang penerapan anggaran berbasis kinerja. Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD dibuat untuk memenuhi tuntutan penganggaran berbasis kinerja. Pengeluaran yang optimal atau teralokasi diperlukan dalam penganggaran berbasis kinerja, yang berarti bahwa semua pengeluaran harus ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Machmud, (2014) anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian dan penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana pemerintah daerah. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung peningkatan

kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Dianah, (2017) kinerja keuangan merupakan hasil dari pelaporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar keuangan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan adalah gambaran dari keberhasilan organisasi (Pratama et al., 2023). Ini dapat digambarkan sebagai hasil dari berbagai tindakan. Menurut Machmud, (2014) kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu organisasi telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan benar. Hal ini dipaparkan oleh Dwi Utami dkk., (2017) pengukuran kinerja diawali dengan proses penentuan indikator kinerja yang memberikan informasi yang memungkinkan unit kerja suatu perusahaan memantau kinerjanya dalam menghasilkan keluaran dan hasil bagi konsumen. Kemandirian dan kemampuan untuk memperoleh, memiliki, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan daerah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Akbar, (2018) Anggaran pada instansi pemerintah selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian, juga sebagai instrumen dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sistem penganggaran pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah disusun sesuai proses penganggaran yang berbasis kinerja. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh informasi yang dikumpulkan oleh Peneliti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan anggaran yang didasarkan pada kinerja. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak tepat dan pembengkakan anggaran. Artinya Input, output dan hasil tidak tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Sapulette (dalam Sitanala, 2023) anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Dengan anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang ingin dicapai.

Sebagai salah satu SKPD di pemerintahan

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditugaskan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT harus menyusun laporan keuangannya dengan memperhatikan ketentuan penting tentang pengelolaan keurangan dan otonomi daerah, dan ketentuan pelaksanaannya dapat diperkuat dengan PERDA.

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Berikut tabel Anggaran dan Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran DISPERINDAG Provinsi NTT Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	(%)
2019	22.869.999.040,00	21.203.021.530,00	92,71
2020	16.253.920.004,00	15.061.714.767,00	92,67
2021	13.095.650.516,00	12.733.342.972,00	97,32
2022	18.821.831.170,00	17.555.022.828,00	93,27
2023	12.185.712.848,00	9.062.951.522,00	74,37

Sumber : Olahan Data DISPERINDAG

Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian realisasi Disperindag Provinsi NTT, dengan tingkat realisasi yang baik, tetapi realisasi cenderung menurun dan belum mencapai target yang direncanakan, Ini ditunjukkan oleh perbedaan antara realisasi belanja dan anggaran, yang menunjukkan bahwa ada program atau kegiatan yang belum selesai. Jumlah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp22.869.999.040,00 dan terealisasi sebesar 92,71%. Lalu pada tahun 2020, anggaran menurun menjadi Rp16.253.920.004,00 dan tingkat realisasinya sebesar 92,67%. Pada tahun 2021 walaupun anggaran menurun menjadi Rp13.035.650.516,00 namun realisasinya mencapai 97,32%. Pada tahun 2022 anggaran naik menjadi Rp18.821.831.170,00 dan tingkat realisasinya sebesar 93,27%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan dengan anggaran sebesar Rp.12.185.712.848,00 dan tingkat realisasinya hanya mencapai 74,37%. Dengan demikian, maka pada tahun 2019-2020 tingkat realisasinya hanya menurun sebesar 0,04%. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 tingkat realisasinya mengalami peningkatan sebesar 4,65%. Lalu Pada tahun 2021-2022 tingkat realisasinya mengalami penurunan 4,05%. Kemudian pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan mencapai 18,9%.

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 1.1

diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019-2023 mengalami naik turun atau fluktuatif. Hal ini terlihat dari tingkat realisasi 2019 sampai dengan 2020 yang mengalami penurunan sebesar 0,04%. Lalu pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 4,65%. Kemudian pada tahun 2021-2022 kembali mengalami penurunan sebesar 4,05%. Bahkan penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat realisasinya hanya mencapai 74,37% dari anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020,2022 dan 2023 terhadid kelebihan anggaran dan terdapat program serta kegiatan yang tidak terlaksana dengan optimal dalam pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang tidak terlaksana dengan optimal bisa saja berdampak pada pencapaian tujuan, kualitas pelaksanaan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, maka anggaran belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020,2022 dan 2023 tidak terealisasi dengan baik. Anggaran belanja yang tidak terealisasi dengan baik diduga akan mengakibatkan kinerja keuanan menjadi tidak ekonomis, efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh penelitian yang dikemukakan oleh Amri ddk., (2024) berjudul Analisis Pengaruh

Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 hingga 2022, menemukan bahwa realisasi anggaran yang rendah menunjukkan bahwa entitas tidak dapat mengelola sumber daya keuangan dengan baik. Hal ini dapat berakibat pada terhambatnya pencapaian tujuan organisasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan.

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kinerja keuangan lembaga pemerintah dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bertanggung jawab, dan bersih. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Perbara, (2022) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat: Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan kinerja keuangan telah diterapkan secara efektif, ekonomis, dan efisien, serta anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya dilakukan oleh Esni ddk., (2020) dengan judul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen anggaran berbasis kinerja merupakan faktor utama yang memengaruhi seberapa baik pengelolaan keuangan Kota Medan berjalan.

#### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebab akibat dan metodologi kuantitatif. Menurut Widyawati dkk, (2023) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data yang terstruktur dengan menggunakan angka-angka. Populasi ini adalah seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 95 pegawai. Sebanyak 68 responden yang digunakan dalam riset ini. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kusioner melalui link google form kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 1.2 Definisi Operasional**

Variabel	Definisi	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Anggaran berbasis kinerja adalah penerapan sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangka dalam kegiatan-kegiatan dengan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian <i>outcome</i> dari <i>output</i> tersebut (Ito dkk., 2024)	Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak (Akbar, 2016)
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan adalah kesanggupan pemerintah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai kebutuhan pemerintah, pembangunan serta pelayanan sosial (Fitriani, 2022)	Efisiensi Efektivitas Ekonomis (Pundissing & Pagiu, 2021)

### 1. Uji Validitas

Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengevaluasi seberapa besar ketergantungan alat ukur terhadap data penelitian.

**Tabel 1. 2 Uji Validitas**

Item	Variabel	R <sub>hitung</sub>	Ket
1	Anggaran Berbasis Kinerja	0,522	Valid
2		0,774	
3		0,551	
4		0,559	
5		0,507	
6		0,582	
7		0,652	
8		0,673	
9		0,627	
10		0,732	
11		0,755	
12		0,754	
13		0,663	
14		0,813	
15		0,729	
16		0,578	
17		0,762	
18		0,662	
19		0,647	
20		0,669	
21		0,691	
22		0,804	
23		0,737	
24		0,830	
25		0,759	
1	Kinerja Keuangan	0,711	Valid
2		0,710	
3		0,758	
4		0,701	
5		0,733	
6		0,791	
7		0,757	
8		0,741	
9		0,809	

10	0,671
11	0,613
12	0,710
13	0,850
14	0,867
15	0,435

Sumber : Olahan Data SPSS 21

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel anggaran berbasis kinerja dan variabel kinerja keuangan dikatakan valid karena nilai rhitung lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  yaitu 0,3061.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan dalam pengujian reliabilitas untuk mengukur ketergantungan alat penelitian.

**Tabel 1.5 Hasil Reliabilitas**

Variabel	$\alpha$	Klasifikasi	Ket
Anggaran Berbasis Kinerja	0,952	Sangat Tinggi	Reliable
Kinerja Keuangan	0,937	Sangat Tinggi	Reliable

Sumber: Olahan Data SPSS 21

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, tingkat reliabilitas anggaran berbasis kinerja sebesar 0,952 dan kinerja keuangan sebesar 0,937 menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, alat ukur tersebut dapat dikatakan dipercaya.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas.

**Tabel 1.6 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.12775863
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.987
Asymp. Sig. (2-tailed)		.285
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Olahan Data SPSS 21

Tabel 1.6 diatas menunjukkan sifat data yang terdistribusi dengan baik pada anggaran berbasis kinerja dan kinerja keuangan keseluruhan. Jika nilai signifikan yang valid adalah  $0,285 > 0,05$ .

**Uji Linearitas**

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah bentuk persamaan yang dihasilkan linear atau tidak. Berikut adalah tabel hasil uji linearitas.

**Tabel 1.7 Hasil Uji Linearitas**

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Keuangan	Between Groups	(Combinded)	4928.201	37	133.195	3.030	.001
		Linearity	3731.056	1	3731.056	84.882	.000
* Anggaran Berbasis Kinerja	Within Groups	Deviation from Linearity	1197.145	36	33.254	.757	.790
		Total	1318.667	30	43.956		
			6246.868	67			

Sumber: Olahan Data SPSS 21

Tabel 1.7 menunjukkan adanya hubungan linear yang cukup besar antara variabel anggaran berbasis kinerja dengan kinerja keuangan, dengan deviasi dari linearitas sebesar  $0,790 > 0,05$ .

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residul dari suatu pengamatan kepengamatan lain. Berikut adalah tabel hasil uji heterokedastisitas.

**Tabel 1.8 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.015E-013	4.991		.000	1.000
	Anggaran Berbasis Kinerja	.000	.050	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Olahan Data SPSS 21

Variabel anggaran berbasis kinerja memiliki nilai signifikansi sebesar  $1,000 > 0,05$  seperti yang terlihat pada tabel 1.8. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Uji Regresi Linear Sederhana**

Uji regresi linear sederhana sebuah metode statistic yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Berikut adalah tabel hasil uji regresi linera sederhana.

**Tabel 1.9 Hasil Linear Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.222	4.991		2.248	.028
Anggaran Berbasis Kinerja	.492	.050	.773	9.893	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olahan Data SPSS 21

**Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah tabel hasil uji t.

**Tabel 1.10 Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	11.222	4.991		
1 Anggaran Berbasis Kinerja	.492	.050	.773	9.893	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olahan Data SPSS 21

**Uji Koefisien Determinasi**

Uji Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi.

**Tabel 1.11 Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.773 <sup>a</sup>	.597	.591	6.174	1.715

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja  
 b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olahan Data SPSS 21

Menurut hasil uji koefisien determinasi yang ditemukan pada tabel 1.11 nilai sebesar 0,597 atau 59,7% menunjukkan bahwa

anggaran berbasis kinerja memberikan kontribusi sebesar 59,7% terhadap kinerja keuangan. Faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 0,403 atau 40,3%.

**PEMBAHASAN**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis dan peningkatan kinerja keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Semua item pertanyaan dalam kusioner dinyatakan valid dengan nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,3061) pada taraf signifikansi 5%. Selain itu, uji reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi pada kedua variabel, yaitu anggaran berbasis kinerja ( $\alpha = 0,952$ ) dan kinerja keuangan ( $\alpha = 0,937$ ).

Analisis statistik membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Nilai signifikansi yang sangat kecil (0,000) mengindikasikan bahwa hasil ini sangat signifikan secara statistik. Selain itu, nilai t hitung yang jauh diatas ttabel (9,993 > 1,999773) memperkuat temuan

bahwa anggaran berbasis kinerja memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah. Anggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada hasil yang ingin dicapai daripada hanya proses penganggaran untuk mengoptimalkan alokasi dana. Semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka semakin baik pula kinerja keuangan suatu pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Sofyani & Prayudi, (2018) bahwa penyerapan anggaran akan berjalan lebih baik jika anggaran dilaksanakan lebih baik berdasarkan kinerja.

Menurut penelitian Ali Zakiyudin (dalam Suyanto, 2015) dihasilkan bahwa secara parsial variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah tetapi untuk variabel evaluasi kinerja. memiliki pengaruh negatif sedangkan variabel pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah toba samosir, Penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berdampak pada kinerja keuangan Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Noverman Duadji, (2019) akuntabilitas kinerja

merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi public. Akuntabilitas kinerja adalah capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Tujuan penerapan anggaran ini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dengan mengaitkan anggaran dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

Penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya Achmad, (2023) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wardani (dalam Silvia, 2021) berjudul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Yulia (dalam Ningsih, 2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berdampak positif pada kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung yang lebih besar dari nilai  $t$  tabel (1,893 lebih besar dari 1,9997771), dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari probabilitas ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi yang artinya pengelolaan anggaran lebih terarah dan terukur, sehingga mengurangi pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak produktif. Serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan dan program yang dilaksanakan lebih relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Dengan demikian, maka anggaran berbasis kinerja tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan-tujuan strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

## SARAN

1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memperhatikan penggunaan anggaran dengan menjalankan manajemen keuangan yang baik. Ini akan menghasilkan kegiatan dan program yang efektif dan efisien.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian harus melihat faktor independen lain yang mempengaruhi kinerja keuangan instansi pemerintah daerah seperti akuntabilitas, pengendalian intern dan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2023). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektivitas Pengendalian Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Ilmiah Akuntansi*, 14(3), 63–74.
- Akbar, D. S. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 93–106.
- Akbar, D. S. (2018). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 36–44.
- Ali Zakiyudin, M., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89–96. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.99>

- Amri, A. M., Zulkieflimansyah, Z., & Yamin, A. (2024). Pengaruh Anggaran dan Realisasi terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 443–453. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3570>
- Dewi Kurniasari, Dedeh Kurniasari. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 71–88.
- Dianah, T. (2017). Analisis Dampak Keputusan Akuisisi Terhadap Perubahan Kinerja Perusahaan Pengakuisisi (Studi Kasus Pada PT Jasa Marga (Perseroan) Tbk). *Jurnal Online Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*, 2(2), 1–10.
- Dwi Utami, R., Julian, K., & La Tansa Mashiro, S. (2017). Pengaruh Evaluasi kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. *Of Management*, 4(1), 33–40.
- Esni, M. T., Made, A., & Wulandari, R. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i2.4254>
- Fitriani, A. (2022). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(1), 1–9. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.574>
- Hafiz, M. S. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 63–78. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6519>
- Ito, M. N., HenrikusHerdi, & Diliana, S. M. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Accounting UNIPA*, 3(2), 88–100.
- Kuntadi, C., & Prita Yuniarti Ramayani. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja: Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(3), 605–613. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3.88>
- Machmud, et al. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Noverman Duadji. (2019). Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. *Musamus Journal of Public Administration*, 28(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Perbara, A. (2022). Implementasi Prinsip - Prinsip Administrasi Keuangan Di Indonesia. *Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi*, 2(1), 1–10.
- Pratama, I. M., Saragi, F., Pratama, Y., & Sopiandah, V. A. (2023). Efek Literasi Financial dan Financial Behavior terhadap Financial Satisfaction. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 96–106.
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 3.
- Sapulette, S. G., & Sitanala, T. F. (2023).

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(2), 655–660.

- Sofyani, & Prayudi. (2018). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 35–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368>
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.625>
- Widyawati, I., Firmansyah, I., & Junal. (2023). Peningkatan Hasil Belajar IPA Setelah Menggunakan Model Discovery Learning Pada Siswa Kelas V SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(01), 6511–6523.
- Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 50–58. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15433>